

**FUNGSI ASEAN BAGI INDONESIA DI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN
JOKO WIDODO : TINJAUAN MELALUI SENGKETA LAUT TIONGKOK
SELATAN**

DISUSUN OLEH :

RIZKY ANGGIA PUTRI

1510852007

Pembimbing I : Sofia Trisni, S.IP, MA (IntRel)

Pembimbing II : Bima Jon Nanda S.IP, MA



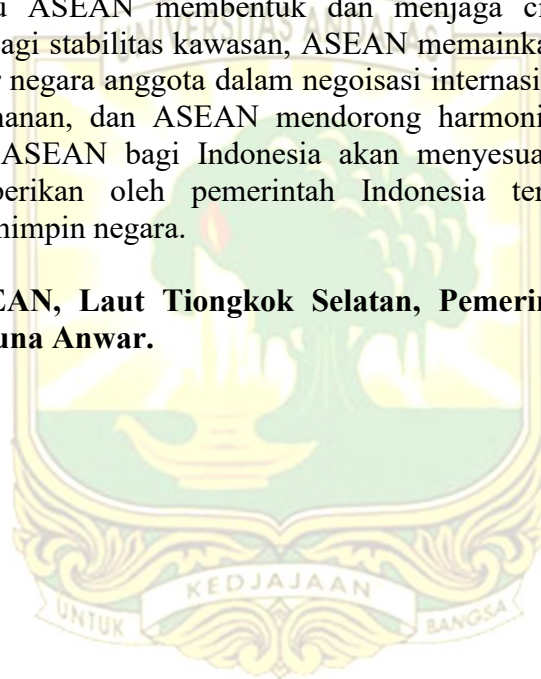
**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fungsi ASEAN bagi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan tinjauan kasus sengketa Laut Tiongkok Selatan. Sengketa Laut Tiongkok Selatan bermula dari klaim wilayah oleh Tiongkok yang kemudian di sebut *nine dash line* bersinggungan dengan wilayah kedaulatan empat negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia dan Vietnam. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan argumen delapan fungsi ASEAN bagi Indonesia menurut Dewi Fortuna Anwar dengan metode *tracing process*. Penulis menemukan adanya indikasi perubahan pendekatan pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam hal sikap serta kebijakan yang diambil berkaitan dengan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Penulis menemukan bahwa delapan fungsi ASEAN bagi Indonesia sebagaimana disebutkan dalam tesis Dewi Fortuna Anwar telah mengalami perubahan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari delapan fungsi ASEAN bagi Indonesia yang disebutkan oleh Dewi Fortuna Anwar, hanya empat fungsi yang berjalan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu ASEAN membentuk dan menjaga citra indonesia sebagai tetangga yang baik bagi stabilitas kawasan, ASEAN memainkan peran penting dalam meningkatkan *power* negara anggota dalam negoisasi internasional, ASEAN berperan sebagai *buffer* keamanan, dan ASEAN mendorong harmonisasi kawasan. Hal ini dikarenakan fungsi ASEAN bagi Indonesia akan menyesuaikan dengan besarnya perhatian yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap ASEAN serta karakteristik dari pemimpin negara.

Kata Kunci : ASEAN, Laut Tiongkok Selatan, Pemerintah Indonesia, Joko Widodo, Dewi Fortuna Anwar.



ABSTRACT

This study aims to analyze the function of ASEAN for Indonesia during the administration of President Joko Widodo with a review of the case of the South China Sea dispute. The South China Sea dispute stems from territorial claims by China, which is then called the nine dash line intersecting with the sovereignty of four ASEAN member countries, namely Brunei Darussalam, the Philippines, Malaysia and Vietnam. In conducting research, the author uses the eight ASEAN function arguments for Indonesia according to Dewi Fortuna Anwar using the tracing process method. The author found an indication of changes in the approach of the Indonesian government during the administration of President Joko Widodo in terms of attitudes and policies taken relating to the South China Sea dispute. The author found that the eight functions of ASEAN for Indonesia as stated in the Dewi Fortuna Anwar thesis had undergone changes during the administration of President Joko Widodo. Of the eight functions of ASEAN for Indonesia mentioned by Dewi Fortuna Anwar, only four functions are running during the administration of President Joko Widodo, namely ASEAN forming and maintaining the image of Indonesia as a good neighbor for regional stability, ASEAN plays an important role in increasing the power of member countries international negotiations, ASEAN acts as a security buffer, and ASEAN encourages regional harmonization. This is because ASEAN's function for Indonesia will adjust to the amount of attention given by the Indonesian government to ASEAN and the characteristics of the country's leaders.

Keywords: ASEAN, South China Sea, Indonesian Government, Joko Widodo, Dewi Fortuna Anwar.

